

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Edwin Y. Mokerimban¹, Daisy S.M. Engka², Debby Ch. Rotinsulu³

Edwinmoko79@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap alokasi belanja daerah. Adapun secara teoritis factor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) mampu meningkatkan belanja daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata kunci: Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on regional expenditure allocations. As for the theoretical factors that influence regional spending in Southeast Minahasa Regency. Original Dareah Income (PAD) is all regional revenue that comes from the original regional economic sources. The data used in this research is secondary data. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The results showed that the Regional Original Income (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), the Revenue Sharing Fund (DBH) had a significant effect on regional spending. It can be concluded that the Regional Original Income (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), the Revenue Sharing Fund (DBH) are able to increase regional spending in Southeast Minahasa Regency.

Keywords: *Regional Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Production Sharing Fund, Local Own Income*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian daerah yang terus digalakan oleh pusat maupun daerah merupakan sebuah wujud tujuan bersama guna mencapai kesejahteraan yang merata di masyarakat. Dengan adanya perekonomian daerah yang kuat akan berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya. Akibatnya pemerintah pusat harus rela menanggung beban pengeluaran sebuah daerah dengan kucuran Dana Transfer untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Saat ini guna menunjang pembangunan di daerah dibutuhkan sumber-sumber pendapatan yang tidak sedikit antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam era otonomi daerah saat ini tentu proses pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat dibarengi dengan tugas dan tanggung jawab untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerah untuk dapat berkembang ke arah lebih baik. Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Saragih 2003 : 82).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?

Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap alokasi Belanja Daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap Belanja Daerah.
3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap Belanja Daerah.
4. Pengaruh dana bagi hasil terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara bersama/simultan terhadap Belanja Daerah.

Manfaat Penelitian

1. Secara umum dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif tentang fundamental keuangan daerah khususnya bagi yang melakukan penelitian
2. member sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan baik pemerintah maupun stakeholder terkait
3. secara teoritis kontribusi penting penelitian ini terhadap pengembangan teori dan ilmu pengetahuan khususnya dijadikan acuan/referensi bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang

Tinjauan Pustaka Anggaran Daerah

Bagi seorang akuntan anggaran dipandang sebagai sebuah cara untuk menelusuri keuangan pemerintah, karena dari uraian yang terdapat dalam anggaran terlihat secara jelas penggunaan dari uang negara sehingga dapat ditelusuri apa saja dan berapa banyak barang-barang yang dimiliki negara sebagai kekayaan negara, akibat adanya investasi pemerintah dalam anggaran negara. Sedangkan bagi ahli ekonomi anggaran adalah suatu alat untuk memperlancar atau menghambat terhadap produksi barang dan jasa.

Menurut Mardiasmo (2002: 62), anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2002), dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah" beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kelompok pendapatan asli daerah, dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, rincian pajak daerah sebagaimana dalam Undang Undang tersebut diatas.
2. Retribusi Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang terbagi menjadi :
 - a) Retribusi Jasa Umum,
 - b) Restribusi Jasa Usaha, dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, terdiri dari:
 - a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan

denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari jasa raharja.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005: yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus juga dialokasikan ke daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan tersebut. Artinya pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan, (Kuncoro, 2007). Kelompok pendapatan dana perimbangan sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas dan fiskal daerah) dari alokasi dasar.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. tertentu (Halim, 2004: 65). Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBD.

Belanja (Pengeluaran) Daerah.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:85) yang mengemukakan bahwa Belanja Daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto.

Dalam Permendagri 13 tahun 2009 kelompok belanja di kategorikan dalam dua kelompok yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengelompokan belanja dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
 1. Belanja Pegawai;
Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan dalam belanja pegawai.

2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Belanja Subsidi;
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Belanja Hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
5. Belanja Bantuan sosial;
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja Bagi Hasil;
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Belanja Bantuan keuangan; dan
Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
8. Belanja tidak terduga.
Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

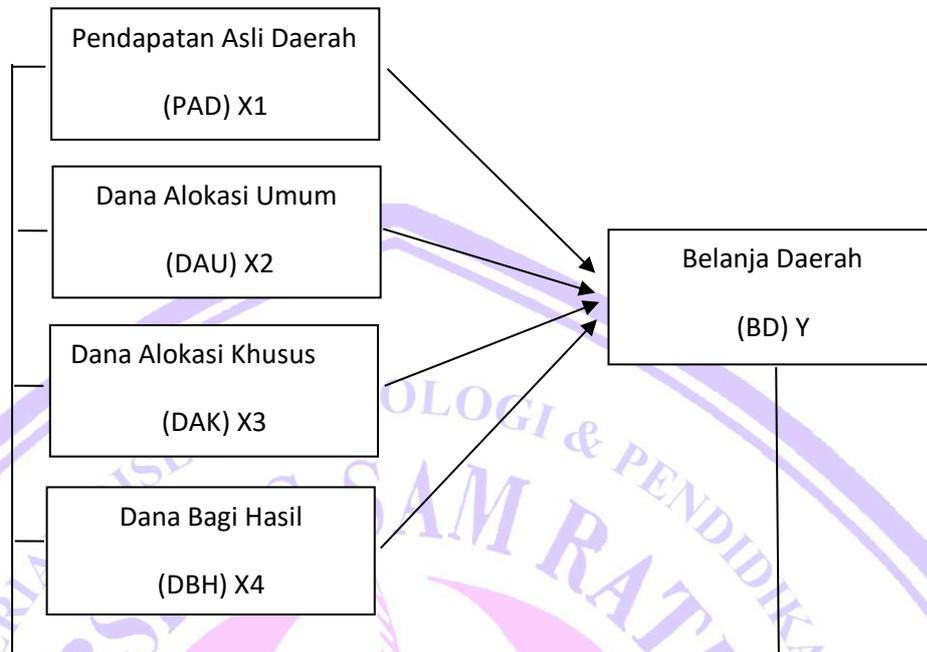
b. Belanja Langsung

Menurut Hasyim (2009) Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/ Personalia, Belanja Barang/ Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Pengelompokan belanja langsung terdiri tiga jenis belanja yang terdiri belanja pegawai, barang jasa, dan modal. Adapun penjelasan dari ketiga belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai;
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
2. Belanja barang dan jasa; dan
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
3. Belanja modal.
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah ?
2. Diduga bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah ?
3. Diduga bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah ?
4. Diduga bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah ?
5. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi tertentu yang sesuai dengan jenis penelitian dan dalam penelitian ini mengambil data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara (Bappeda).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil data dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2010 sampai 2019. Serta data rataan dalam angka, juga mengakses situs bps.co untuk mendapatkan data tambahan mengenai keadaan keuangan serta keadaan geografis.

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, komponen dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan dana Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Selain itu analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel.

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias linear yang terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

dimana :

Y_1 = Belanja Daerah

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Dana Alokasi Khusus

X_4 = Dana Bagi Hasil

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi

e = standart eror

Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. (Suliyanto, 2011)

Untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

$$t_{tabel} = n-k-1$$

Dimana :

β_1 = koefisien regresi variabel independen ke-i

Se = standar error dari variabel independen ke-i

N = jumlah data

K = jumlah variabel

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam

model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan derajat kebebasan: df: α , (k-1), (n-k). Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus : (Suliyanto.2011)

Rumus nilai F hitung :

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana : F= Nilai F hitung

R^2 = Koefisien determinasi

N = Jumlah observasi

K = Jumlah variable

Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_i = 0$ semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas secara bersama-sama

$H_1 : \beta_i \neq 0$ semua variabel atau minimal salah satu variabel berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama

Ket : Dimana β_i terdiri dari $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil..

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 1
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Imam Ghozali, 2006

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik
Uji Multikorelasi

Tabel 2
Multikorelasi

Model	Collinearity Statistics	
	VIF	Tolerance
(Constant)		
1		
Pad	7,876	,127
Dau	3,942	,254
Dak	3,508	,285
Dbh	2,751	,363

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber data : Pengolahan Data 2020

Dilihat dari tabel 2 Coefficients nilai VIF pada Output menunjukkan keberadaan multikolinearitas.

Bila $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi gejala Multikolerasi

Bila $VIF > 10,00$ maka terjadi gejala Multikolerasi

Dengan Hasil :

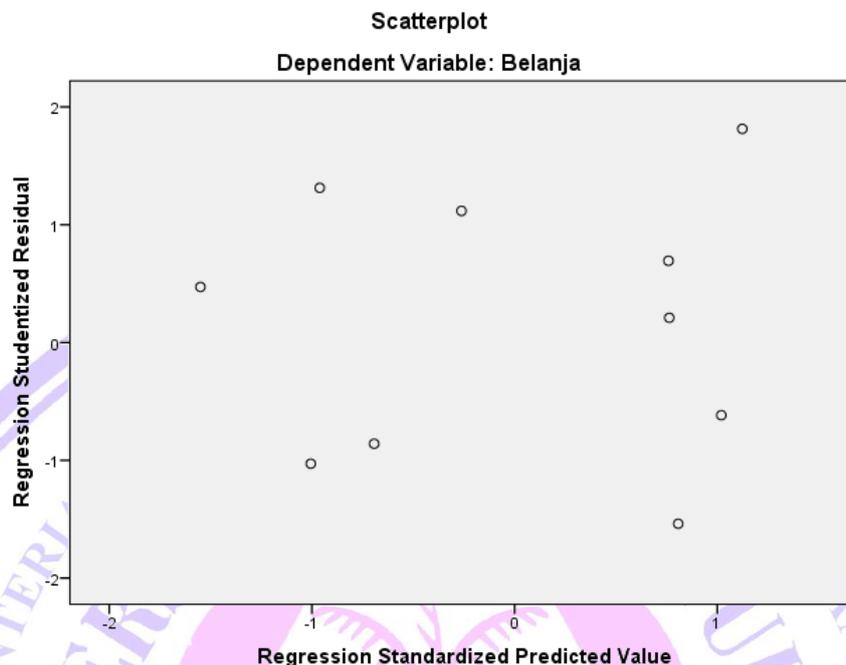
Nilai Tolerance : X1 PENDAPATAN ASLI DAERAH = 0,127
 : X2 DANA ALOKASI UMUM = 0,254
 : X3 DANA ALOKASI KHUSUS = 0,285
 : X1 DANA BAGI HASIL = 0,363

Nilai VIF : X1 PENDAPATAN ASLI DAERAH = 7,876
 : X2 DANA ALOKASI UMUM = 3,924
 : X3 DANA ALOKASI KHUSUS = 3,508
 : X1 DANA BAGI HASIL = 2,751

Menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini mendekati garis normal, hal ini menunjukkan bahwa semua data yang digunakan terdistribus secara normal. Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan hasil nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF (variance inflation factor) kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heterokoladasitas

Gambar 1
Kurva Uji Heterokedastisitas hasil Model Penelitian



Dari diagram diatas terlihat penyebaran residual tidak teratur. Hal tersebut terlihat pada plot yang terpancar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan diambil bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Auto Korelasi

Model	Change Statistics			Durbin-Watson
	df1	df2	Sig. F Change	
1	4 ^a	5	,000	2,140

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH

b. Dependent Variable: BELANJA

Sumber data : Pengolahan Data 2020

Pada analisis regresi terlihat bahwa nilai DW 1,374 dan nilai DL 0.367, dan DU 2,286. $DL < DW < DU$ yakni $0.369 < 1,374 < 2,286$. DW berada pada antara DL dan DU dan berada pada titik keragu-raguan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi yang lemah.

Pengaruh secara langsung Variabel Independen Exogenous PAD, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap Variabel dependen Endogenous Belanja Daerah

Tabel 4
R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,991 ^a	,981	,966	,02408	,981	64,906

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH

b. Dependent Variable: BELANJA

Sumber data : Pengolahan Data 2020

Model Summary diatas, pada nilai R square. Besarnya R square (R2) pada tabel diatas ini adalah 0,966. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya pengaruh Variabel independen exogenous pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap variabel dependen endogenus Belanja Daerah secara gabungan.

Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,966 \times 100\%$$

$$KD = 96,6 \%$$

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja daerah secara gabungan adalah 96,6 %.

Dan pengaruh diluar model dapat di hitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,966$$

$$e = 0,034 \times 100\%$$

$$e = 3,4 \%$$

Yang berarti 3,4 % berarti besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang di teliti. Artinya besarnya pengaruh variabel independen ekxogenous pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap variabel dependen endogenus Belanja Daerah adalah sebesar 96,6%, sedangkan pengaruh sebesar 3,4% oleh variabel di luar model yang di teliti.

Pengaruh Per Variabel

Menentukan besarnya pengaruh yang diberikan, oleh tiap-tiap variabel independent secara individual terhadap variabel dependent.

Tabel 5
T-Square

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,864	2,466		,756	,484
1 Pad	,199	,075	,456	2,645	,046
1 Dau	,302	,157	,234	1,917	,113
1 Dak	,206	,051	,466	4,047	,010
1 Dbh	,215	,154	,142	1,391	,223

Sumber : pengolahan data 2020

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Pendapatan Asli Daerah Terhadap Variabel Dependen Endogenous Belanja Daerah

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 10 - (4+1) = 5$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,0150 (untuk uji dua arah)

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Pendapatan Asli daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah ialah 0,2,645.

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 0,2,645 > t tabel sebesar 2,015. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous pendapatan asli daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah. Maka Variabel Independen Exogenous pendapatan asli daerah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous Pendapatan Asli Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,456 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0,04 < 0,05.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Dana Alokasi Umum Terhadap Variabel Dependen Endogenous Belanja Daerah

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 10 - (4+1) = 5$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,0150 (untuk uji dua arah)

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Dana Alokasi Umum terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah ialah 1,917.

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 1,917 < t tabel sebesar 2,015. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous dana alokasi umum terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah. Maka Variabel Independen Exogenous dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous dana alokasi umum terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized

Coefficients Beta) ialah 0,234 tidak Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0,113 > 0,05.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Dana Alokasi Khusus Terhadap Variabel Dependen Endogenous Belanja Daerah

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 10 - (4+1) = 5$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,0150 (untuk uji dua arah)

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Dana Alokasi Khusus terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah ialah 4,047.

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $4,047 > t$ tabel sebesar 2,015. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous dana alokasi khusus terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah. Maka Variabel Independen Exogenous Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous dana alokasi khusus terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,466 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0,01 < 0,05$.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Dana Bagi Hasil Terhadap Variabel Dependen Endogenous Belanja Daerah

Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 10 - (4+1) = 5$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,0150 (untuk uji dua arah)

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Dana Bagi Hasil terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah ialah 1,391.

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $1,391 < t$ tabel sebesar 2,015. Dengan demikian keputusannya ialah H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous dana bagi hasil terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah. Maka Variabel Independen Exogenous dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous dana bagi hasil terhadap Variabel Dependen Endogenous belanja daerah diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,142 tidak Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0,223 > 0,05$.

Melihat Kelayakan Model Regresi

Untuk mengetahui model regresi yang telah dibuat sudah benar adalah dengan menggunakan pengujian dengan dua cara, yaitu Pertama menggunakan nilai F pada tabel keluaran ANOVA, dan Kedua dengan cara menggunakan nilai Probabilitas / nilai Sig pada tabel anova

Tabel 6
Keluaran ANOVA.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,150	4	,038	64,906	,000 ^b
	Residual	,003	5	,001		
	Total	,153	9			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber Data : Pengolahan Data 2020

Menghitung nilai F tabel dengan Ketentuan besar nilai taraf Signifikansi sebesar 0,05 dan Nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numerator / Vektor 1 : Jumlah Variabel – 1 atau $5 - 1 = 4$, dan dumerator / Vektor 2 : jumlah kasus-jumlah variabel atau $8 - 5 = 3$. Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 9,12.

Dengan kriteria pengambilan keputusan hasil pengujian hipotesis

Jika F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak, H₁ diterima.

Jika F hitung < F tabel, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.

Hasil uji hipotesis adalah :

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar $64,906 > F$ tabel sebesar 9,12. Dengan demikian H₀ ditolak, dan H₁ diterima. Artinya ada hubungan linier antara Variabel Independen Eksogenus Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan Variabel Dependen Endogenus Belanja Daerah. Dengan nilai Sig 0,00 Kesimpulannya adalah model regresi di atas sudah layak dan benar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penghitungan didapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Tujuan utama dari banyaknya daerah yang baru dimekarkan atau disebut dengan daerah otonomi baru adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut, sehingga sedikit demi sedikit akan menuju kemandirian dan salah satu indikator penting untuk dapat menilai bahwa daerah tersebut bisa dikatakan mandiri adalah melalui pendapatan asli daerah yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah tersebut maka akan semakin baik daerah tersebut mengelola keuangan dan prioritas pembangunan yang dimiliki tanpa perlu untuk menunggu kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.

Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik akan juga mampu melakukan pembangunan prioritas daerah dengan menggunakan anggaran yang dimiliki secara mandiri melalui pendapatan asli daerah, dengan adanya pembangunan berskala prioritas daerah yang dibiayai sendiri oleh daerah tersebut maka dipercaya dapat semakin meningkatkan pendapatan atau perekonomian yang dimiliki daerah tersebut.

Pajak dan retribusi menjadi komponen utama pendapatan asli daerah, sehingga bisa dikatakan apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan pendapatan asli daerah yang mereka miliki maka perlu adanya peningkatan yang dilakukan di bagian penerimaan pajak dan retribusi, tentu daerah Minahasa Tenggara belum bisa memaksimalkan pendapatan pada dua sektor ini dikarenakan masih banyaknya kebutuhan perangkat serta badan usaha yang ditangani baik secara langsung maupun tidak langsung oleh daerah, tentu dengan adanya badan usaha yang dikelola oleh daerah akan bisa meningkatkan pendapatan pajak maupun retribusi. Hal lainnya yang tidak kalah penting bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dapat meningkatkan kemandiriannya

adalah membuka peluang usaha atau sektor-sektor ekonomi baru yang belum ada sebelumnya serta memaksimalkan sektor ekonomi yang dimiliki.

Sementara untuk dana alokasi umum juga bisa dikatakan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah, karena prioritas pembangunan yang dimiliki oleh daerah atau alokasi penganggaran yang dimiliki masih berdasarkan program prioritas nasional terhadap daerah otonomi baru, sehingga dana atau anggaran yang diterima pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara tidak sepenuhnya penganggarnya bisa disesuaikan dengan prioritas daerah. Saat ini dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara masih banyak merupakan komponen alokasi khusus, atau dana alokasi khusus sehingga penggunaannya harus sesuai dengan tujuan kenapa dana tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Karena hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa dana alokasi umum, dan Dana Bagi Hasil secara sendiri tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan bahwa dalam upaya pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara untuk meningkatkan alokasi belanja masih menemui banyak permasalahan. Seperti masih rendahnya tingkat pendapatan asli daerah yang dimiliki serta masih tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari pusat. Bahkan alokasi dana transfer berupa dana alokasi umum masih belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini dikarenakan dana transfer yang diterima berupa dana alokasi khusus yang penganggaran serta tujuan anggaran merupakan program pemerintah pusat atau program daerah yang menjadi prioritas nasional. Sehingga masih kurang luasnya pemerintah daerah dalam melakukan prioritas penggunaan anggaran yang dimiliki.

Prioritas penggunaan anggaran perlu menjadi hak utama dari daerah dengan menggunakan anggaran hasil pendapatan mereka sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah, hal ini perlu dilaksanakan karena peran pemerintah daerah yang sangat vital dan dianggap lebih mengetahui mengenai permasalahan serta kebutuhan yang ada di daerah, dengan demikian permasalahan yang muncul bisa segera ditangani oleh pemerintah daerah dan semakin memajukan perekonomian yang mereka miliki.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah di kabupaten Minahasa Tenggara penulis coba memberikan beberapa saran yang mungkin bisa digunakan oleh pihak yang membutuhkan baik pemerintah, swasta, maupun akademis.

- a. Perlu adanya peningkatan pendapatan daerah melalui badan usaha daerah, baik yang sudah ada ataupun baru untuk memaksimalkan pendapatan di sektor pajak dan retribusi.
- b. Harus adanya program kerja prioritas dari pemerintah daerah guna menangani permasalahan serta kebutuhan yang dimiliki oleh daerah
- c. Perlu adanya sektor ekonomi baru yang dibuka atau memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki guna memaksimalkan pendapatan asli daerah.
- d. Perlu adanya rangsangan positif yang diberikan ke dunia usaha atau kepada para pemodal baik lokal maupun dari luar daerah untuk mengembangkan atau membangun usaha mereka di daerah

Adanya kemudahan perijinan usaha, sehingga akan banyak usaha baru yang dibuka dan dapat meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bastian, Indra, Gatot Soepriyanto, 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep Untuk Pemerintah Daerah, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Burhanuddin, 2010, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat, 2007, Metode Kuantitatif, *Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Santoso, Singgih.. 2001. *SPSS Versi 11,5 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)